



Marhaban ya Ramadhan 2026  
semoga hati dibersihkan dan iman dikuatkan



### Soal Revisi UU KPK

## Anggota Komisi III DPR Minta Jokowi Tak Buat Opini Baru

Jakarta, MIMBAR - Anggota Komisi III DPR RI Nasyrul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin mengembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versi lama.

Pria yang akrab disapa Gus Falah ini menilai bahwa Jokowi punya andil dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurutnya, melempar permasalahan ini hanya ke DPR RI dengan menyebut legislator sebagai pihak yang berinisiasi melakukan revisi UU

■ Bersambung ke Hal 11



## Hilal 1 Ramadan 1447 H Tak Terlihat di 96 Titik Wilayah Indonesia

Jakarta, MIMBAR - Pengamatan hilal atau rukyatul hilal awal Ramadan 1447 Hijriah yang dilakukan di 96 titik di seluruh wilayah Indonesia tak membuahkan hasil. Hilal dinyatakan tak terlihat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tak ada yang melaporkan melihat posisi hilal oleh petugas yang ditempatkan di 96 titik pengamatan di Indonesia.

"Tidak ada laporan posisi hilal yang terlihat," kata Nasaruddin dalam Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 1447 H, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2).

Menag juga memaparkan posisi hilal berdasarkan hisab atau perhitungan. Menurutnya seluruh posisi hilal di Indonesia masih di bawah ufuk.

"Adapun posisi hilal di seluruh Indonesia ketinggian berkisar

■ Bersambung ke Hal 11



## Korban Banjir di Pidie Jaya Dapat Bantuan Meugang dari Prabowo

Aceh, MIMBAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Aceh, menyalurkan bantuan tradisi meugang menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat terdampak bencana banjir.

Bantuan tradisi meugang berupa hewan ternak sapi tersebut disalurkan Bupati Pidie Jaya Sibril Maslyi

■ Bersambung ke Hal 11

# Tapteng Kembali Direndam Banjir

## Listrik Padam, Jalan Putus



Tapteng, MIMBAR - Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, kembali diterjang banjir, Senin (16/2/2026) yang meluas ke hampir seluruh kecamatan.

Banjir menyebabkan rumah warga terendam, listrik padam, akses jalan terputus, serta memaksa warga dievakuasi ke lokasi aman. Sementara pemerintah daerah menyiapkan dapur umum dan terus melakukan penanganan darurat.

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan bahwa banjir kali ini meluas hampir di seluruh kecamatan. Di Kecamatan Tukka, banjir merendam rumah warga di Jalan Humala Tambunan, Bonalumban, Hutanolon.

Akibatnya, terjadi pemadaman listrik. "Warga

■ Bersambung ke Hal 11

## BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat Sepekan ke Depan di Jawa-Sumatra

Jakarta, MIMBAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadaai potensi hujan lebat di sejumlah wilayah di Indonesia akibat Monsun Asia mulai 15 hingga 21 Februari ke

■ Bersambung ke Hal 11

**Jadwal Salat**

1 RAMADHAN 1447 H

Imsak : 05:13 WIB	Ashar : 16:01 WIB
Subuh : 05:23 WIB	Maghrib : 18:42 WIB
Zuhur : 12:41 WIB	Isya : 19:52 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

## Hidayah Daging Non Halal

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Di tengah hiruk-pikuk kota yang terus tumbuh, persoalan sering kali tampak sepele: saluran air tersumbat, bau menyengat, limbah tak terkelola, dan ruang publik yang semrawut. Namun, sejarah sosial menunjukkan bahwa banyak konflik besar justru bermula dari persoalan kecil yang dibiarkan membusuk secara harfiah maupun simbolik.

Isu penataan perdagangan komoditas daging hewan non-halal di Kota Medan, misalnya, seharusnya dibaca sebagai persoalan tata kelola kota: soal drainase, kesehatan lingkungan, dan keteraturan ruang publik. Tetapi ketika narasi bergeser



■ Bersambung ke Hal 11

## Perbedaan Awal Ramadan Menag Harap Tak Membuat Perpecahan

Jakarta, MIMBAR - Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap perbedaan awal Ramadan 1447 H tidak merusak persatuan dan kesatuan antarumat Islam di Indonesia.

"Seandainya ada di antara umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda, sesuai kami mengimbau pada

■ Bersambung ke Hal 11

### Menyusuri Fenomena 'Tembok Ratapan' di Rumah Jokowi

## Pengunjung Diminta Tak Meratap

KEDIAMAN Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara No 1 menjadi sorotan warganet setelah lokasi tersebut di Google Maps mendadak diberi label "Tembok Ratapan Solo".

Penamaan itu muncul tepat di titik rumah pribadi Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari.

Kehebohan makin meluas setelah beredar video seorang pemuda yang beraksi seakan-akan meratap di depan gerbang rumah tersebut. Salah



■ Bersambung ke Hal 11

## Ukraina Tudung Rusia Tak Mau Akhiri Perang

Medan, MIMBAR - Ukraina menuding Rusia mengabaikan upaya perdamaian dengan meluncurkan serangan ke wilayah Ukraina pada Senin (16/2) malam. Informasi ini disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga mengutip AFP.

■ Bersambung ke Hal 11



semoga tidak ada lagi korban jiwa.  
■ Aamiin ...

## Tapteng Kembali Direndam Banjir .....

Dari Halaman 1

di Hutanabolon, Tukka, terpaksa dievakuasi menggunakan mobil Dalmas ke Hunian Semerata (Huntara) Sipange," ujar Masinton, lewat pesan singkat, Senin (16/2/2026) malam.

### Akses Jalan Terputus

Kemudian di Kecamatan Badiri, kondisi tak kalah parah. Lubuk Ampolu dan Lopian terendam dengan ketinggian air yang terus meningkat hingga memutus akses jalan keluar masuk desa. "Arus air yang deras membuat sejumlah ruas jalan tidak dapat dilalui," ujar Masinton. Bahkan di Kecamatan Pasaribu Tobing, dua

rumah, satu kantor desa, dan satu unit PAUD terendam, dan nyaris tenggelam.

Banjir juga melumpuhkan Kecamatan Pandan, Tapian Nauli, Lumut, Kolang, Pinangsoni, Manduamas, hingga Sosorgadong.

"Sejumlah ruas jalan utama tergenang, membuat kendaraan roda dua dan roda empat tak bisa melintas," ucapnya.

Lalu, di Desa Siordang, Sirandorong, listrik padam saat rumah-rumah warga mulai terendam.

### Warga Dievakuasi

Sementara di Desa Unte Mungkur I, Kolang, tercatat empat titik banjir yang merendam jalan dan permukiman.

Di wilayah pesisir dan perbatasan, Kecamatan Barus dan Andam Dewi, kondisi lebih mengkhawatirkan.

Sungai Aek Sirahar meluap, tanggul jebol, dan debit air mencapai satu meter di sejumlah desa di Kecamatan Barus, seperti Kinali, Pasar Terendam, Ujung Batu, Kampung Mudik, Aek Dakka, dan Padang Masiang.

"Proses evakuasi masih berlangsung," kata Masinton.

Masinton mengimbau agar warga yang ada di sekitar bantaran sungai supaya segera dilakukan evakuasi, ke titik yang aman dan disiapkan dapur umum di setiap kecamatan dan desa.

(bes/js)



## Ukraina Tuding Rusia .....

Dari Halaman 1

Ukraina mengatakan bahwa Rusia merusak upaya perdamaian dengan meluncurkan puluhan rudal dan ratusan drone menjelang pembicaraan di Jenewa hari ini. Upaya perdamaian ini untuk mengakhiri perang yang telah terjadi selama empat tahun.

"Sejauh mana Rusia mengabaikan upaya perdamaian dengan meluncurkan serangan rudal dan drone besar-besaran terhadap Ukraina tepat sebelum pembicaraan damai di Jenewa," tulis Menteri Luar Negeri Andriy Sybiga di media sosial.

Angkatan udara Ukraina mengatakan Rusia telah meluncurkan 29 rudal dan 396 drone dalam serangan yang menurut Ukraina jika Rusia menargetkan infrastruktur penting.

Setelah itu, Ukraina membalasnya dengan meluncurkan lebih dari 150 drone, namun militer Rusia berhasil menghancurkan drone-drone yang masuk wilayahnya.

(cnni/js)

## Anggota Komisi III DPR Minta Jokowi Tak Buat .....

Dari Halaman 1

tersebut adalah wujud 'cuci tangan' Jokowi. "Jokowi seharusnya jangan cuci tangan dengan membuat opini baru yang mengaburkan fakta, dengan tujuan memperoleh apresiasi publik," ujarnya, Senin (16/2/2026).

Gus Falah menyatakan dalam UU Nomor 15 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden punya kewenangan membahas RUU bersama DPR melalui menteri terkait, memiliki hak mengajukan RUU di luar Prolegnas, serta mengoordinasikan perencanaan regulasi pemerintah.

Presiden melalui utusan pemerintah juga punya peranan dalam pembahasan tahap II yakni

rapat paripurna DPR RI.

"Jejak peran Jokowi jelas terlihat pada tanggal 11 September 2019, ketika muncul surat beliau sebagai Presiden kepada DPR untuk menguskan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai wakil pemerintah membahas Revisi UU KPK," ujar Gus Falah.

Gus Falah melanjutkan, kalau Jokowi tidak setuju seharusnya yang bersangkutan menarik perwakilan pemerintah dalam proses pembahasan atau mengeluarkan Perppu karena pada saat itu ada dinamika publik.

"Tanggal 17 September 2019 pada saat pengambilan keputusan, Menteri hukum dan HAM mewakili Presiden menyatakan Presiden setuju perubahan UU KPK, sehingga sangat lucu

jika Jokowi melempar bola panas bahwa revisi ini karena inisiatif DPR," kata Gus Falah.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi merespons positif usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan marwah KPK lewat UU yang lama.

Hal itu dikatakannya sesuai menyaksikan laga Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan, Jumat (13/2/2026)

"Ya, saya setuju, bagus," ujar Jokowi.

Namun, ia buru-buru menepis tanggung jawab atas revisi tahun 2019 dengan alasan bahwa beleid tersebut adalah inisiatif legislatif.

"Itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Tapi saya tidak pernah tanda tangan," dalihnya.(tr/js)

## Hilal 1 Ramadan 1447 H Tak Terlihat di 96 Titik .....

Dari Halaman 1

derajat 24 menit 42 detik, berarti itu.. belum hilal berwujud masih di bawah ufuk, hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan pemerintah-pemerintah di diskusinya, di seluruh negara-negara Islam pun itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk," Nasaruddin usai Sidang Isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2).

Ia juga mengatakan, berdasar hilal global versi Turki, awal Ramadan belum dimulai Rabu (18/2).

"Dalam menetapkan awal bulan Kamariah,

Indonesia menggunakan visibilitas hilal MA-BIMS yaitu tinggi hilal (minimal) 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat, ini standarnya," ujarnya.

"Dengan demikian berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari," kata Nasaruddin menambahkan.

Terdapat perbedaan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada tahun ini antara pemerintah dengan Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 besok.

Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari

M sebagaimana tercantum dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.

Penetapan ini menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode baru yang kini menjadi acuan resmi Muhammadiyah. Ini menggantikan metode wujudul hilal yang sebelumnya digunakan.

Implementasi KHGT mensyaratkan keterpaduan tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP).

Salah satu parameter pentingnya ialah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas pada wilayah tertentu.(cnni/js)

## Korban Banjir di Pidie Jaya Dapat Bantuan .....

Dari Halaman 1

bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Pidie Jaya di Pidie Jaya, Senin (16/2).

Bantuan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana banjir akhir November 2025 yang tersebar sejumlah kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, di antaranya Meureudu, Meurah Dua, Trienggadeng, Panteraja, Bandar Dua, Ulim, dan Bandar Baru.

"Bantuan Presiden ini guna memenuhi kebutuhan tradisi meugang sebagai wujud perhatian pemerintah pusat bagi masyarakat yang masih berada dalam masa transisi pemulihan pascabencana," kata Sibril, dikutip

dari Antara.

Sibril mengatakan, total bantuan tradisi meugang yang diterima Pemkab Pidie Jaya mencapai Rp4,9 miliar. Bantuan tersebut direalisasikan melalui pembelian sapi untuk masyarakat terdampak.

"Dari total anggaran bantuan Presiden tersebut, pemerintah daerah melakukan pengadaan sebanyak 245 ekor sapi untuk diserahkan kepada masyarakat di gampong-gampong terdampak banjir bandang," katanya.

Ia mengatakan, setiap sapi diberi nomor seri sesuai data desa penerima guna memastikan distribusi tepat sasaran. Jika terjadi kekeliruan atau nomor seri tertukar, harus dikembalikan "Setiap sapi sudah ada nomor serinya dan

diserahkan ke masing-masing desa penerima. Bantuan sapi tidak boleh berpindah ke desa lain karena akan diperiksa dalam proses distribusi. Camat dan aparat desa harus ikut mendampingi agar penyaluran tertib," kata Sibril.

Sibril berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga dalam menyambut Ramadhan 1447 Hijriah.

"Semoga bantuan tersebut membantu masyarakat merayakan dan menikmati tradisi meugang bersama keluarga serta menjadi penyemangat untuk bangkit, dan mempercepat pemulihan kehidupan sosial ekonomi pascabencana," kata Sibril.(ant/js)

## BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat Sepekan ke Depan .....

Dari Halaman 1

depan.

Beberapa wilayah yang berpotensi diguyuru hujan, yakni Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.

"Fenomena dinamika atmosfer yang bergerak dinamis memicu pertumbuhan awan hujan, terutama di wilayah Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian utara," demikian dikutip dari rilis resmi BMKG.

Monsun Asia membawa aliran angin baratan cukup dominan sehingga mempercepat pertumbuhan awan konvektif di wilayah Indonesia bagian Barat dan Selatan.

BMKG menyebut, kondisi itu diperkuat oleh aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO), yang berada pada fase Indian Ocean,

dan dukungan gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby yang memicu terbentuknya perlambatan dan belokan angin (konvergensi), khususnya di pesisir selatan Jawa hingga Nusa Tenggara.

"Kombinasi faktor tersebut meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang, lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah," katanya.

BMKG memprediksi, pada 15-16 Februari, cuaca ekstrem berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Papua.

Lalu, pada 17-18 Februari, hujan berpotensi membayangi wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY,

Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.

Sementara itu, pada 19 Februari wilayah yang perlu diwaspadai adalah wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Pegunungan. Dan pada 20-21 Februari potensi masih berlanjut, terutama di wilayah Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

"BMKG mengingatkan masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan namun tetap tenang dan menghindari aktivitas di lokasi berisiko, seperti daerah aliran sungai, lereng rawan longsor, serta wilayah yang berpotensi mengalami banjir dan genangan," katanya.(cnni/js)

## Menag Harap Tak Membuat Perpecahan .....

Dari Halaman 1

seluruh masyarakat, mari perbedaan tidak menyebabkan berpisah atau dalam arti negatif," kata Nasaruddin dalam Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2).

Menurutnya di Indonesia kerap terjadi perbedaan penentuan awal Ramadan, namun hal itu tak membuat perpecahan sesama Muslim.

"Di Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam kesatuan yang indah," ungkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis (19/2). Hal itu lantaran secara rukyatul hilal atau paman-

tauan hilal di 96 titik di Indonesia, posisi hilal tidak terlihat.

Kemudian secara hisab atau perhitungan, posisi hilal masih negatif atau posisi bulan di bawah ufuk.

"Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya hilal yang terlihat disepakati 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026," kata Nasaruddin.

Terdapat perbedaan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada tahun ini antara pemerintah dengan Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 besok.

Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari M sebagaimana tercantum dalam Maklumat Pimpinan

Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.

Penetapan ini menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode baru yang kini menjadi acuan resmi Muhammadiyah. Ini menggantikan metode wujudul hilal yang sebelumnya digunakan.

Implementasi KHGT mensyaratkan keterpaduan tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP).

Salah satu parameter pentingnya ialah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas pada wilayah tertentu.(cnni/js)

## Pengunjung Diminta Tak Meratap .....

Dari Halaman 1

satu unggahan video itu dibagikan akun Instagram @indopium.

"Tembok Ratapan di Solo kini jadi salah satu spot paling hype buat anak muda Gen Z," tulis akun tersebut, Senin (16/2).

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Fitriansyah, mengaku telah mengetahui kemunculan nama unik itu di platform digital. Namun, ia belum

bisa memastikan apakah Jokowi sudah mengetahuinya atau belum.

"Ya, saya sudah tahu. Enggak tahu Bapak sudah tahu apa belum ya," katanya saat dihubungi.

Saat ditanya kemungkinan pengajuan perubahan nama di Google Maps, Syarif tidak banyak berkomentar. Ia juga mengaku tidak merasa tersinggung dengan penyematan label tersebut.

Lebih lanjut, Syarif menegaskan tidak

ada pembatasan bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke rumah pribadi Jokowi meski lokasi itu sedang viral.

"Tidak ada (pembatasan), tetap seperti biasa saja," ujar Syarif.

Meski demikian, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi meratap di depan gerbang kediaman tersebut. Syarif menyebut masih ada sejumlah pengunjung yang mencoba meniru aksi serupa hingga hari ini.(cnni/js)



## Daging Non Halal

Dari Halaman 1

jadi isu agama atau politik identitas, maka yang terjadi bukan lagi diskusi rasional, melainkan pembelahan emosional.

Di sinilah urgensi komunikasi publik menjadi kunci. Pemerintah dan DPRD tidak boleh gamang. Mereka harus tegas menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan pembatasan keyakinan, melainkan pengaturan ruang demi kesehatan bersama. Negara hadir bukan untuk mengintervensi iman, melainkan untuk memastikan tata kota berjalan sesuai standar kebersihan, kesehatan, dan keteraturan.

Jika narasi ini gagal dijaga, maka potensi ketegangan akan membesar. Ketergangguan umat mayoritas baik karena aroma, visualisasi, maupun simbol yang dianggap sensitif di ruang publik dapat berkembang menjadi rasa tidak nyaman kolektif. Dalam masyarakat majemuk, rasa terganggu yang dibiarkan tanpa kanal komunikasi yang sehat bisa berubah menjadi kecurigaan. Dan kecurigaan adalah jalan masuk bagi konflik.

Kita tidak sedang berbicara tentang siapa benar atau salah dalam keyakinan. Kita berbicara tentang bagaimana ruang kota dikelola secara adil dan profesional. Mayoritas yang merasa terganggu bisa terdorong pada sikap reaktif apabila merasa aspirasinya diabaikan. Sebaliknya, minoritas bisa merasa terancam apabila kebijakan tidak dikomunikasikan secara inklusif dan proporsional. Dalam situasi seperti itu, satu percikan kecil bisa menyulut api sosial yang sulit dipadamkan.

Polemik ini sesungguhnya menjadi ujian bagi elite daerah: apakah mereka mampu mengelola isu secara rasional berbasis tata kelola kota, atau justru membiarkannya menjadi komoditas politik musiman? Politik identitas selalu menggoda, terutama menjelang momentum elektoral. Namun, menjadikan isu kebersihan dan tata ruang sebagai bahan mobilisasi emosional adalah bentuk kelalaian kepemimpinan.

Langkah awal wali kota patut diapresiasi. Respons cepat menunjukkan adanya sensitivitas terhadap keresahan publik. Namun langkah administratif tanpa fondasi regulasi yang kuat hanya akan menjadi dokumen arsip. Bola kini ada di DPRD. Apakah mereka berani memperkuat kebijakan ini dalam bentuk regulasi yang jelas, terukur, dan berbasis kajian kesehatan lingkungan?

Regulasi yang tegas akan memberi kepastian hukum sekaligus menghindarkan tafsir liar. Tanpa itu, pengawasan di tingkat kecamatan dan kelurahan akan berjalan setengah hati. Aparat di lapangan membutuhkan pedoman yang jelas: standar lokasi, sistem pengelolaan limbah, mekanisme distribusi, hingga sanksi administratif. Tanpa mekanisme sanksi, kebijakan akan kehilangan daya paksa.

Lebih jauh, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh komunikasi yang cermat. Pemerintah kota dan DPRD perlu melibatkan tokoh masyarakat lintas agama dalam proses sosialisasi. Partisipasi lintas komunitas akan membangun persepsi bahwa kebijakan ini bukan agenda kelompok tertentu, melainkan kebutuhan bersama untuk menjaga harmoni sosial.

Harmoni bukan berarti meniadakan perbedaan. Harmoni adalah kemampuan mengelola perbedaan dalam kerangka aturan yang disepakati. Kota modern tidak bisa disandera oleh sentimen sektarian, tetapi juga tidak boleh abai terhadap sensitivitas sosial. Di sinilah kepemimpinan diuji: berani tegas dalam kebijakan, namun lembut dalam komunikasi.

Kekhawatiran terbesar bukan pada perbedaan itu sendiri, melainkan pada potensi tindakan agresif yang bisa muncul jika isu ini dipelintir. Ketika umat mayoritas merasa aspirasi kebersihannya diabaikan, atau ketika kelompok lain merasa distigmatisasi, ruang publik berubah menjadi arena saling curiga. Situasi seperti itu membuka peluang bagi aktor-aktor oportunistik untuk memprovokasi.

Medan adalah kota plural dengan sejarah panjang koeksistensinya. Jangan biarkan persoalan drainase dan limbah berubah menjadi simbol pertarungan identitas. Pemerintah harus konsisten, DPRD harus berani, dan masyarakat harus dewasa.

Apresiasi terhadap langkah awal wali kota tetap layak diberikan. Namun tahap berikutnya adalah konsistensi pengawasan, regulasi yang lebih kuat, dan komunikasi publik yang jernih. Tata kelola kota yang tegas sekaligus inklusif bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga soal mencegah api sosial yang bisa menyala dari lorong-lorong yang kita abaikan.

Jika Medan berhasil mengelola isu ini secara rasional, ia bukan hanya menata saluran airnya ia sedang menata kematangan demokrasi.